

MENINGKATKAN KESADARAN BERKOPERASI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL BIDANG EKONOMI

Syamsu Ridhuan, Elistia, Widya Astuty
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebun Jeruk, Jakarta Barat - 11510
syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

Community service partners are the National Unity and Political Agency of the Jakarta Provincial Government. One of the tasks and functions of forming and fostering the National Integrity Forum. Members came from representations of 34 ethnic provinces in Indonesia and 3 (three) from ethnic Chinese, Arabic and Indian descendants. The problem faced by partners is the desire to improve welfare and empower members to be able to try independently to strengthen economic resilience. But there is no appropriate place to mobilize and empower the economy to be seen as the right way to achieve the goal. The method of activity is the transfer of knowledge andragogically by : assistance, consultation, socialization and the practice of establishing sharia cooperatives jointly between national integrity forum with lecturers and community service implementing students, facilitated by the National Unity and Political Agency of the Jakarta Provincial Government. Providing technical assistance in establishing sharia cooperatives with direct involvement as managers and members of cooperatives. The result of community service is the National Sharia Cooperatives characterized by a notary deed of establishment and a cooperative legal entity. Output of scientific articles published in the national journal Abdimas Esa Unggul.

Keywords: *Coperatie, resilience, sharia.*

Abstrak

Mitra Pengabdian Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu tugas dan fungsi membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan. Anggota forum berasal dari representasi 34 etnis provinsi di Indonesia dan 3(tiga) dari etnis keturunan: Tionghoa, Arab dan India. Masalah yang dihadapi mitra adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan anggota agar mampu berusaha secara mandiri memperkuat ketangguhan ekonomi. Namun belum ada wadah yang tepat untuk menggerakkan dan memberdayakan ekonomikoperasi dipandang sangat tepat untuk mencapai tujuan. Metode kegiatan adalah transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara : asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik mendirikan koperasi syariah secara bersama-sama antara Forum Pembauran Kebangsaan dengan dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat, yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Memberikan bantuan secara teknis mendirikan koperasi syariah dengan keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi. Hasil pengabdian masyarakat berdiri koperasi Pembauran Kebangsaan yang berkarakteristik syariah lengkap dengan akta notaris pendirian dan badan hukum. Luaran artikel ilmiah dipublikasikan pada jurnal nasional Abdimas Esa Unggul.

Kata kunci: Koperasi, ketangguhan, syariah.

Pendahuluan

Forum Pembauran Kebangsaan disingkat dengan FPK adalah merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan (Kemendagri. 2018). Pengurus dan anggota forum berasal dari berbagai unsur etnis dan suku bangsa Indonesia yang diusulkan oleh organisasi Badan Musyawarah Daerah masing-masing provinsi dan/atau Badan Pengubung

Provinsi yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta.

Dasar hukum keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman pemberian tanda penghargaan Forum Pembauran Kebangsaan. Dengan mempedomani kedua peraturan menteri dalam negeri tersebut, maka sejak tahun 2016 telah didirikan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi

DKI Jakarta, melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 641 tahun 2016 Jo. Nomor 1269 tahun 2017 tentang Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta periode 2016-2021. Setelah itu secara berturut-turut diikuti oleh pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di tingkat Wilayah Kota dan Kabupaten dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta, kecuali FPK Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur telah terbentuk lebih awal, yaitu sejak tahun 2015. Eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan secara formal dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta, dibuat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan dan dari hasil asesmen kebutuhan organisasi yang disusun dan ditetapkan melalui rapat kerja Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta. Secara garis besar program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta menyangkut pengurangan proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai suku, ras, agama dan etnis melalui proses interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan suku, ras, agama dan etnis masing-masing dalam kerangka wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendagri. 2018).

Salah satu program kerja Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta adalah penguatan bidang perekonomian anggota dan pengurus yang sekaligus bersentuhan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari hasil identifikasi kebutuhan melalui berbagai diskusi antar anggota dan pengurus, serta atas arahan personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pembinaan forum pembauran kebangsaan, maka perlu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan pengurus, salah satunya dengan membantu kopersasi keluarga besar forum pembauran kebangsaan dalam lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu gabungan antara anggota dan pengurus FPK DKI Jakarta dengan FPK Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Munculnya gagasan pendirian dan pembinaan koperasi keluarga besar forum pembauran kebangsaan tidak dengan serta merta secara mudah berdiri koperasi, tetapi melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan pemerintah. Pemilihan jenis dan gerakan kopersipun diarahkan pada koperasi syariah, dengan tujuan untuk tetap berpedoman pada norma agama, norma sosial dan peraturan pemerintah. Koperasi

syariah diharapkan mampu untuk memutus rantai riba hingga menjadi 0 %, sebab fenomena riba sangat merugikan baik ditinjau dari masalah kemanusiaan apalagi agama. Dari sudut kemanusiaan efek negatif riba adalah terjadi pemerasan secara masif dan terorganisir melalui sistem bunga pinjaman yang tidak pantas ada pada usaha koperasi simpan pinjam, dan/atau usaha-usaha lain yang menimbulkan efek riba dalam pengelolaannya. Sedangkan dari sudut pandang agama, maka jelas riba hukumnya dosa besar.

Untuk mewujudkan impian mendirikan dan membina koperasi syariah pada keluarga besar forum pembauran kebangsaan, pihak mitra dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menganggap perlu bantuan transfer pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ekonomi koperasi, lebih tepatnya adalah asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah dari para dosen Universitas Esa Unggul. Kegiatan yang diminta oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta ini, direspon positif oleh para dosen melalui program pengabdian pada masyarakat, dan sebagai tindak lanjut diadakan pertemuan tanggal 6 November 2018 di Kantor Kesbangpol DKI Jakarta, guna mendiskusikan langkah-langkah kerjasama dan justifikasi pembentuk serta pembinaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengurus forum pembauran kebangsaan dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Metode Pelaksanaan

Tahapan atau langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada kelembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta, adalah dengan memberikan bantuan transfer pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ekonomi koperasi. Secara teknis, maka metoda atau cara pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah oleh para dosen pelaksana pengabdian pada masyarakat.

Bentuk Kegiatan Abdimas

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk multi metode dan teknik dalam memberikan kontribusi mentransfer ilmu pengetahuan, yaitu berupa asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.

Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Lokasi kegiatan beada di ibu kota Jakarta, secara spesifik kegiatan pengabdian pada masyarakat berlangsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi diadakan di Hotel Sentral Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan yang bersifat asistensi, konsultasi, dan praktik pendirian koperasi syariah yang secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi dilaksanakan di ruang rapat Badan Kesbangpol DKI Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi syariah terhadap Forum Pembauran Kebangsaan. Forum ini suatu organisasi yang dibina oleh mitra pengabdian masyarakat, yang dalam hal ini adalah lembaga pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk dapat meningkatkan kesadaran berkoperasi, maka langkah pertama harus dibentuk koperasi yang berbadan hukum terlebih dahulu, kemudian langkah kedua adalah melakukan pembinaan kepada anggota koperasi, baik yang berasal dari institusi mitra maupun anggota Forum Pembauran Kebangsaan. Pembinaan dilakukan secara tentatif sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mitra. Oleh sebab itu, perlu dipertegas bahwa batasan pengabdian ini, adalah sampai pada taraf pembentukan koperasi. Namun demikian, secara bersamaan dengan kegiatan pembentukan, dilakukan usaha-usaha menumbuhkan motivasi dan keadaran berkoperasi, serta pencerahan berbagai bidang pengetahuan yang terkait dengan kompetensi koperasi syariah.

Untuk lebih terperinci tentang hasil-hasil pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan tujuan dia atas, adalah sebagai berikut :

a. Hasil-Hasil Yang Dicapai

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan Januari 2019 adalah pertama dibentuk koperasi syariah, dan kedua diberikan pembekalan meningkatkan kesadaran berkoperasi.

1) Pembentukan Koperasi

Terlaksananya pembentukan koperasi adalah sebagai tindak lanjut dari permintaan mitra untuk mendirikan koperasi syariah pada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta, yang dibina oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta. Maka pada tanggal 6 November 2018 diadakan rapat konsultasi persiapan pembentukan koperasi. Berikut adalah dokumen rapat persiapan pembentukan koperasi.

Langkah berikut, masing-masing adalah sosialisasi, rapat pendirian dan penanda tanganan akta pendirian koperasi. Sesuai dengan regulasi koperasi bahwa apabila anggota koperasi berasal lebih dari atau minimal 3 provinsi, maka sosialisasi dapat dilakukan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Mengnegah, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 di Hotel Sentral Jakarta Timur. Berikut foto kegiatan sosialisasi.



Gambar 1
Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan
Koperasi di Hotel Sentral Jakarta

Setelah kegiatan sosialisasi, maka langkah selanjutnya adalah rapat pendirian koperasi. Rapat pendirian dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 bertempat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta. Rapat pendirian dihadiri oleh 50 orang pendiri, masing-masing berasal dari utusan FPK Provinsi, FPK Wilayah Kota Adiminstrasi Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu dan PNS staf Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Adapun hasil dan keputusan rapat pendirian koperasi, yang paling penting adalah bahwa seluruh peserta rapat secara aklamasi dan sepakat untuk mendirikan koperasi pada organisasi Forum Pembauran Kebangsaan. Kemudian Koperasi diberi nama, Koperasi Pembauran Kebangsaan, dengan usaha pokok bidang jasa perdagangan, yang dikelola dengan pendekatan syariah.

Agar koperasi dapat melaksanakan usaha secara legal-formal, maka langkah berikutnya adalah penanda tanganan akta pendirian koperasi. Acara pendatangan akta dihidri dan dilakukan di depan notaris yang berwenang membuat akta pendirian koperasi. Penanda-tanganan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018 di ruang rapat Kantor Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Foto penanda-tanganan akta pendirian sebagai berikut.

Proses lebih lanjut adalah pengajuan badan hukum kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Pengajuan badan hukum dilakukan oleh notaris, melalui proses on line.

2) Pembekalan Peningkatan Kesadaran

Pembekalan dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian. Kegiatan ini dilakukan pada saat acara sosialisasi dan rapat pendirian koperasi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pemberian motivasi dan dorongan psikologis untuk menumbuhkan kesadaran berkoperasi. Selain itu juga dilakukan transfer pengetahuan tentang (1) Ekonomi Koperasi, (2) Pengelolaan Usaha/Koperasi Syariah, dan (3) Konsepsi Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi

b. Pembahasan

Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari dosen pelaksana pengabdian pada masyarakat, berupa ilmu pengetahuan multi disiplin dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan mitra sasaran. Diberikan pembekalan materi pengetahuan secara andragogis agar dapat memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan koperasi, usaha syariah dan ketahanan nasional. Secara substansi, pembekalan tersebut meliputi :

- a. Ekonomi Koperasi
- b. Pengelolaan Usaha/Koperasi Syariah
- c. Konsepsi Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi

Ilmu pengetahuan ekonomi koperasi, menyangkut gambaran secara teoritis tentang paradigma perlunya sistem ekonomi koperasi yang merupakan ciri khas perkonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Gambaran yang menyangkut transfer pengetahuan pengelolaan usaha/koperasi Syariah adalah menyangkut teori usaha syariah dan kebijakan badan hukum koperasi. Usaha syariah yang tidak menganut sistem bunga riba sebagaimana yang dilaksanakan pada usaha-usaha sistem konvensional. Riba sangat bertentangan dengan ajaran agama, karena tidak halal dan menimbulkan dosa besar.

Sebagai wujud penguatan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, maka eksistensi koperasi merupakan jawaban yang sesuai dengan semangat koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, meski dalam amandemen UUD 1945 pengelolaan koperasi mengalami pergeseran. Namun apapun bentuk dari pengelolaan koperasi, tidak lain merupakan suatu strategi untuk dapat berkompetisi menghadapi ekonomi global-korporasi yang sudah menghegemoni dalam perekonomian bangsa. Kekuatan hegemoni ekonomi, sebenarnya secara langsung merupan

ancaman melemahkan ketangguhan ketahanan nasional dibidang ekonomi.

Eksistensi hegemoni ekonomi melalui berbagai usaha yang bersifat korporasi hanya menguntungkan segelintir orang terutama bagi pemilik modal, sedangkan rakyat sebagai konsumen tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk usaha yang dianggap dapat memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan, sekaligus dapat memperkuat tingkat ketangguhan ketahanan nasional bidang ekonomi adalah gerakan koperasi Indonesia. Ketahanan nasional dibidang ekonomi menyangkut strategi penguatan ketangguhan ekonomi bangsa Indonesia yang berazaskan ekonomi koperasi Indonesia.

Transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara : asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.



Gambar 5. Gambaran Iptek yang Ditansfer kepada Mitra

Analisa perbandingan antara permasalahan masyarakat sasaran terhadap keseluruhan hasil yang dicapai (luaran, feedback, harapan ke depan). Peng-analisan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, terutama yang berkaitan dengan eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah adanya keinginan mitra Badan Kesbangpol untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pe-ngurus dan anggota forum, dan memberdayakan agar mampu berusaha secara mandiri dalam mem-perkuat ketangguhan ekonmi pengurus dan anggota forum. Namun untuk dapat merealisasikan ke-inginan ini, Badan Kesbangpol belum mempunyai wadah yang tepat untuk menggerakkan dan mem-berdayaan ekonomi, termasuk dalam bentuk usaha-usaha koperasi yang dipandang sangat tepat untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan ketangguhan ekonomi para anggota dan pengurus forum. Untuk keperluan itu, maka perlu ada solusi dengan men-dirikan koperasi (syariah) bagi Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, termasuk Forum Pem-bauran Kebangsaan Wilayah dan Kabnupaten dalam lingkup provinsi DKI Jakarta.

Permasalahan tersebut telah dapat di atasi melalui Kegiatan pengabdian pada masyarakat, dengan multi metoda dan teknik. Yaitu melakukan transfer pengetahuan secara andragogis, dengan cara: asistensi, konsultasi, sosialisasi dan praktik pendirian koperasi syariah secara bersama-sama antara anggota Forum Pembauran Kebangsaan dengan para dosen dan mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol DKI Jakarta, serta memberikan bantuan teknis dalam mendirikan koperasi syariah, berupa keterlibatan secara langsung sebagai pengurus dan anggota koperasi.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah DKI Jakarta telah dilak-sanakan sesuai dengan perencanaan. Permasalahan mitra pengabdian berkaitan dengan adanya ke-inginan untuk memberikan wadah usaha ekonomi produktif, sudah diberikan solusi berupa pendirian koperasi syariah pembauran kebangsaan DKI Jakarta. Sasaran ini, menjadi fokus utama selain sebagai bentuk respon terhadap eksistensi perma-salahan yang dihadapi mitra, tetapi juga sebagai salah satu implementasi tugas dan fungsi peme-rintahan daerah melalui Badan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan.

Hasil-hasil pengabdian yang dicapai adalah pertama, sudah didirikan dan terbentuk satu unit koperasi primer syariah bernama Koperasi Pembauran Kebangsaan yang berkedudukan di

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta. Kedua, telah diberikan pembekalan dengan materi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan dorongan psikologis untuk menumbuhkan kesadaran berkoperasi (syariah). Serta transfer pengetahuan tentang Ekonomi Koperasi, Pengelolaan Usaha/Koperasi Syariah, dan Konsepsi Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi.

Memperhatikan dari seluruh aktivitas kegiat-an pengabdian masyarakat dengan mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Peme-rintah DKI Jakarta, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

Perlu ditindak lanjuti oleh LPPM Univer-sitas Esa Unggul untuk menjalin kerjasama dengan Badan Kesbangpol Pemda DKI Jakarta, sehingga ke depan para dosen dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengabdian masyarakatnya.

Bagi *stakeholder* lain yang memerlukan bantuan asistensi, kosultasi dan praktik pendirian koperasi, pelaksana pengabdian masyarakat siap berkontribusi untuk keperluan membantu pendirian sampai pada pembinaannya.

Daftar Pustaka

- Kemdagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- Kemdagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Forum Pembauran Kebangsaan*. Jakarta : Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- Lemhanas. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
- Pemprop DKI. (2016). *Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 641 tahun 2016 Jo. Nomor 1269 tahun 2017 tentang Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta periode 2016-2021*. Jakarta : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah DKI Jakarta